

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar belakang Masalah

1. Fenomena Globalisasi

Globalisasi yang "dipandegani" oleh negara maju dengan sifat materialisme, kapitalisme, dan liberalisme semakin gencar memasuki wilayah negara diseluruh dunia, termasuk Indonesia.

Materialisme memunculkan perkembangan teknologi yang sedemikian pesat sehingga memunculkan citra modernitas yang sedemikian ramai dikota-kota. *Kapitalisme* memunculkan etos kapitalis. Akan tetapi karena sistem budaya kita, menurut Kuntowijoyo (1994) cenderung dibangun pada sistem "Agromanagerial State" maka yang muncul kapitalisme semu (Erzats Capitalist). Kapitalisme seperti ini menjadi besar bukan disebabkan oleh etos kerja tinggi, melainkan disebabkan adanya kemudahan yang diperoleh akibat kedekatan dengan kekuasaan. *Liberalisme* "merunyakkan" sistem masyarakat yang dibangun sangat kuat oleh sistem nilai budaya tradisi. Masyarakatpun mulai mempertanyakan sistem yang selama ini diyakininya. Dalam proses mempertanyakan sistem tersebut terjadi "split" kesadaran karena sistem nilai yang bertemu memiliki karakteristik yang berbeda bahkan dalam batas-batas tertentu bertentangan.

Ciri lain dari globalisasi adalah munculnya suatu masyarakat yang oleh Jacques Attali (1991:3) dinamakan

masyarakat "Hiperindustrial" yaitu komunitas masyarakat di mana "service are transformed into mass-produced consumer goods". Munculnya masyarakat "Hiperindustrial" ini akan merambah keseluruhan budaya kehidupan manusia.

Berdasarkan fenomena globalisasi tersebut di atas ada beberapa perubahan yang dialami oleh masyarakat antara lain :

Pertama, di era globalisasi masyarakat dituntut hidup dan bekerja dengan informasi. Masyarakat harus tahu segala informasi dan informasi tentang apa saja serta bagaimana cara untuk memperoleh informasi. Kondisi masyarakat seperti itu hanya akan didapat oleh manusia yang memiliki motivasi belajar sangat tinggi.

Kedua, di era globalisasi masyarakat akan penuh dengan persaingan dalam segala hal seperti persaingan dalam memperoleh pekerjaan, menjual barang dan jasa, memperoleh modal, mempopulerkan karya dan diri sendiri. Kondisi seperti itu kunci yang paling utama dalam memperoleh keberhasilan adalah kualitas / mutu manusia. Manusia yang tidak berkualitas sudah barang pasti akan terlindas dan tidak mampu melakukan persaingan guna memperoleh keberhasilan.

Ketiga, di era globalisasi masyarakat dituntut dan bahkan harus memiliki kemampuan intelektual yang bersifat dasar seperti, penguasaan bahasa, pengetahuan alam dan pengetahuan sosial. Di samping itu masyarakat juga dituntut menguasai tehnik-tehnik bekerja dengan alat-alat

teknologi moderen seperti komputer, mengolah data, menyusun rencana fisik mengajar dll. Persyarakat seperti ini disebut " science and tecnology literacy " (Mughtar Buchori ,1995:208).

Selanjutnya Muchtar Buchori menjelaskan, agar masyarakat tetap "survive" maka perlu memiliki persyaratan seperti berikut ini.

- a. Masyarakat harus memiliki kemampuan belajar (learning capability), yaitu kemampuan untuk belajar dalam tatanan-tatanan formal, non formal dan informal;
- b. Masyarakat harus memiliki pengetahuan dan penguasaan terhadap ilmu pengetahuan dan teknologi (science and tehnology literacy);
- c. Masyarakat harus memiliki jiwa berusaha atau wiraswasta (entrepreneurship);
- d. Masyarakat harus memiliki etos kerja yang dapat dihandalkan.

Berdasarkan persyaratan di atas maka muncul persoalan, apakah keempat persyaratan di atas diajarkan dan dapat diperoleh siswa didalam pendidikan ?. Kaitannya pengertian pendidikan adalah proses pembinaan manusia melalui bimbingan dan latihan agar dapat menyesuaikan dengan lingkungan, maka lembaga pendidikan memiliki tanggung jawab sangat besar dalam mewujudkan manusia yang berkualitas dan lebih kusus lagi mampu mewujudkan empat persyaratan agar siswa dapat menghadapi era globalisasi.

Lembaga pendidikan perlu segera melakukan reformasi dalam segala bidang seperti kurikulum, sarana prasarana dan secara terus menerus melakukan pembinaan tenaga pengajar, sebab tanpa dibarengi tenaga pengajar yang berkualitas mustahil akan mampu menghadapi derasnya arus globalisasi.

Untuk mengantisipasi ciri globalisasi tersebut diperlukan suatu strategi untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia khususnya sumber daya manusia dalam lembaga pendidikan.

2. Peranan Pendidikan Dalam Pembangunan Nasional

Manusia berkualitas hanya dapat diberikan dengan strategi yang disebut proses pembangunan (building proces). Pembangunan pada dasarnya merupakan proses perubahan kearah tercapainya kemajuan atau bentuk kualitas hidup yang lebih baik. Sebagai upaya perubahan kualitatif, proses pembangunan tidak diarahkan kepada perubahan sektor perekonomian, yang menyangkut kebutuhan material finansial semata, seperti pemenuhan kebutuhan sandang, pangan dan papan serta pemerataan pendapatan dan kesempatan kerja, namun juga diarahkan kepada sektor kehidupan yang lebih kompleks, yaitu sektor ideologi, agama, sosial budaya, keamanan, yang tergantung kepada tingkat kebutuhan masyarakat atau negara. Proses pembangunan di suatu negara, secara sosio kultural acapkali berbeda dengan proses pembangunan di negara lain, dikarenakan berbedanya orientasi, tujuan, pendekatan

serta prioritas kehidupan yang ditempuh.

Tujuan dan orientasi pembangunan nasional Indonesia, adalah mewujudkan suatu masyarakat adil dan makmur yang merata material dan spiritual. Dengan kata lain, pembangunan diorientasikan untuk meningkatkan kualitas hidup pada segenap sektor mencakup ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, hankam dengan sasaran strategis seperti dicanangkan dalam GBHN tahun 1993 dalam upaya membentuk manusia seutuhnya.

Dalam konteks pembangunan nasional tersebut, pendidikan yang pada dasarnya merupakan proses pencerdasan kehidupan bangsa dan pengembangan manusia Indonesia seutuhnya memiliki posisi sangat strategis dalam meraih keberhasilan pembangunan.

Secara spesifik, dalam bidang pembangunan ekonomi, pendidikan memiliki nilai strategis dan determinatif dalam pencapaian kesejahteraan hidup masyarakat. Di sini pendidikan merupakan salah satu alat efektif untuk meraih kesejahteraan ekonomi masyarakat. Melalui upaya pendidikan suatu proses peralihan pengetahuan, pengalihan ketrampilan, atau pembentukan sikap dan etos kerja individu dapat diwujudkan, sehingga lulusan akan relatif mudah memperoleh lapangan pekerjaan atau menciptakan lapangan pekerjaan, yang pada gilirannya akan diperoleh penghasilan yang dapat dipergunakan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Dalam konteks ini, bahkan Blaugh (1973: 2) merumuskan konsep pendidikan dari segi

ekonomi secara lebih tegas sebagai proses investasi. Pengetahuan dan ketrampilan hasil pendidikan dinilai sebagai "Human Capital" yang kemudian dapat dijadikan sebagai alat produksi, baik untuk kepentingan pribadi atau kepentingan sosial dalam konteks lebih luas. Melalui investasi pendidikan, manusia melakukan proses sedemikian rupa sehingga memiliki pengetahuan dan ketrampilan yang sesuai dengan harapan produktivitas yang dirancangnya. Berdasarkan penelitian di banyak negara, misalkan Kanada, Selandiabar dsb. Blaug menyimpulkan bahwa pertumbuhan ekonomi yang biasanya diukur dengan tingkat pertumbuhan pendapatan nasional (GNP) sangat dipengaruhi oleh faktor pendidikan.

Dalam bidang sosial politik, pendidikan sebagai proses sosialisasi juga memiliki nilai kontributif yang besar dalam pencapaian tujuan pembangunan nasional. Lewat pendidikan, sosialisasi nilai-nilai kehidupan politik, bersosial, atau proses pembentukan budaya berpolitik dapat diselenggarakan dalam rangka pembentukan sikap masyarakat terhadap masalah-masalah dasar tentang sistem politik yang dianut oleh negaranya (*Tom Brennan, 1981:19*). Dengan kata lain, melalui pendidikan dilakukan suatu proses sosialisasi nilai dan norma kepada masyarakat sehingga mereka memahami dan menghayati hak kewajibannya sebagai warga negara secara memadai.

Dalam bidang sosial budaya yang lebih menekankan pada penanaman nilai-nilai budaya, pendidikan menduduki

peran penting dalam pembangunan. Secara lebih luas Zeffreys (1972: 6) mengartikan pendidikan sebagai upaya *pelestarian*. Sebagai upaya pelestarian, pendidikan bukan hanya merupakan alat pelestari, pemelihara, tetapi juga merupakan proses bagaimana nilai-nilai kultural yang positif dan konstruktif bagi manusia kini dan mendatang tetap dipertahankan dari kepunahan dan bencana. Pendidikan mengupayakan terbentuknya nilai-nilai pola perilaku yang adaptatif dengan kebutuhan yang ada dalam masyarakat.

Dalam bidang pendidikan diharapkan dihasilkan manusia yang cerdas dalam kehidupan berbangsa dan bernegara dengan ciri-ciri: beriman, bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berbudi pekerti yang luhur, memiliki pengetahuan dan ketrampilan, kesehatan jasmani dan rohani, kepribadian yang mantap dan mandiri serta memiliki rasa tanggung jawab kemasyarakatan dan kebangsaan (*UUSPN Nomor 2 : 1989*).

Proses pendidikan terutama pendidikan formal menyangkut berbagai faktor antara lain pendidik (guru), peserta didik (siswa), sarana prasarana, metode, tujuan, dan lingkungan. Dari beberapa faktor tersebut gurulah yang memegang peranan penting dalam proses pendidikan dalam arti mencapai kualitas pendidikan Hartono Kasmadi dalam mimbar pendidikan (1990 : 13) mengatakan :

Bahwa apapun yang akan diperbaharui pada gilirannya faktor pendidik (guru) yang banyak menentukan, karenanya upaya pembinaan secara baik dan benar harus selalu dikembangkan

3. Alasan Pentingnya Pembinaan Guru

Titik berat pembangunan pendidikan pada kurun repelita VI ditekankan pada peningkatan mutu. Konsekuensinya, perlu ditingkatkan keseluruhan komponen sistem pendidikan, baik yang bersifat "Human resources" maupun yang bersifat "material resources". Peningkatan keseluruhan komponen sistem pendidikan yang bersifat "human resources" dan "material resources" tersebut dapat diartikan dari segi kuantitasnya maupun kualitasnya. Berbagai upaya peningkatan kualitas komponen sistem pendidikan secara keseluruhan mengarah kepada pencapaian tujuan pendidikan.

Disadari sepenuhnya, bahwa peningkatan kualitas komponen-komponen sistem pendidikan terbukti lebih berpengaruh terhadap peningkatan mutu pendidikan adalah komponen yang bersifat "Human resources". Hal ini dapat dipahami dari kenyataan, bahwa komponen yang bersifat "material resources" tidak dapat bermanfaat tanpa adanya komponen yang bersifat "Human resources".

Diantara komponen-komponen sistem pendidikan yang bersifat "human resources" yang selama ini mendapatkan perhatian lebih banyak adalah tenaga guru. Besarnya perhatian terhadap tenaga guru, antara lain dapat dilihat dari banyaknya kebijaksanaan khusus seperti : adanya kenaikan pangkat otomatis bagi guru, adanya tunjangan fungsional bagi guru dan lahirnya Surat Keputusan Menteri

Pendayagunaan Aparatur Negara (MENPAN) nomor 26 /MENPAN/1989 yang memberikan peluang bagi guru untuk naik pangkat sampai dengan golongan ruang IV/e.

Dominannya perhatian pemerintah, dalam hal ini adalah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, terhadap guru sebenarnya didasarkan atas suatu anggapan, bahwa ditangan gurulah mutu pendidikan kita banyak bergantung. Hal ini dapat dipahami dari kenyataan, tidak berdayanya sekolah-sekolah kita bila tidak ada gurunya. Guru dipandang sebagai faktor kunci, karena ia yang berinteraksi secara langsung dengan muridnya dalam proses belajar mengajar di sekolah. Perhatian yang demikian besar terhadap guru, sangat ditampakkan oleh Daoed Joesouf ketika menjabat Mendikbud yaitu dengan mengusahakan penciptaan lagu Hymne Guru dan menggolongkan guru sebagai jabatan profesi.

Strategi peranan guru dalam meningkatkan mutu pendidikan dapat dipahami dari hakekat guru yang selama ini dijadikan sebagai *Asumsi Programatik* pendidikan guru. Yang dimaksud dengan asumsi programatik pendidikan guru adalah asumsi-asumsi yang dijadikan sebagai pedoman dalam mengembangkan program pendidikan guru. Asumsi-asumsi tersebut guru adalah :

- (1) Agen pembaharuan;
- (2) Berperan sebagai fasilitator yang memungkinkan terciptanya kondisi yang baik bagi subjek didik untuk belajar;
- (3) Bertanggung jawab atas terciptanya hasil belajar subjek didik;
- (4) Dituntut menjadi contoh subjek didik;

- (5) Bertanggung jawab secara profesional meningkatkan kemampuannya;
- (6) Menjunjung tinggi kode etik profesionalnya (Ali Inron, 1995:4).

Sebagai orang yang bertugas mengajar dan mendidik guru akan melaksanakan berbagai kegiatan demi tercapainya tujuan yang telah dirumuskan. Untuk mencapai tujuan tersebut guru harus memainkan fungsinya sebagai *pembimbing, pembaharu, model atau contoh, penyelidik, konselor, pencipta, yang mengetahui sesuatu, pembangkit pandangan, pembawa cerita dan seorang aktor (Olivia F, Peter 1989:10).*

Demikian besarnya peranan guru dalam upaya meningkatkan mutu pendidikan, sehingga para pakar dan pengembang LPTK senantiasa mencari bentuk baru dalam mengembangkan kurikulumnya. Pembinaan kemampuan profesional guru dalam segala bidang termasuk LPM NU perlu mendapat perhatian yang seksama.

4. Profil Guru Dalam Konteks Budaya

Piet Suhartian (1994:21-22) mengemukakan bahwa profil guru dalam konteks budaya dibedakan menjadi tiga macam yakni *Guru di desa, Guru di kota dan Guru di daerah industri.*

Pertama, Guru di Desa

Guru di desa masih terpandang. Ia dipandang sebagai orang yang punya kelebihan. Dalam konteks ini belum banyak kaum intelek yang bermukim di desa. Guru dipandang sebagai orang yang lebih banyak tahu dan terpandang. Guru lebih dihormati semua tugas dan beban pendidikan yang menyangkut

kehidupan masyarakat, guru yang tampil sebagai pemeran utama. Di samping menjadi guru, mereka dapat juga sebagai ketua karang taruna, ketua LKMD, ketua perkumpulan olah raga, pemimpin pramuka dll. Pada satu sisi mereka dipandang terhormat, pada sisi lain memiliki beban yang berat dan terlalu banyak. Terlalu banyak harapan digantungkan pada guru. Akibatnya bila sedikit saja kesalahan yang dibuat, maka mereka menjadi kambing hitam. Selayaknya guru jangan terlalu banyak diberi beban kemasyarakatan agar mereka dapat melakukan tugas pokok dan tugas profesional di sekolah dengan lebih siap.

Kedua, Guru di kota.

Di kota guru itu sibuk bukan sekedar untuk pengabdian kepada masyarakat, tetapi mereka sibuk berjuang untuk mempertahankan tingkat kehidupan yang secara ekonomi lebih tinggi dari di desa. Menjadi Guru harus berusaha menambah pendapatannya agar mereka dapat mempertahankan status dan tingkat kehidupan ekonominya.

Sejak pagi mereka pergi dan sampai malam hari baru pulang kerumah. Mereka harus membuat persiapan untuk mengajar keesokan paginya dan dilakukan secara tergesa-gesa. akibatnya kegairahan/ dorongan mengajar dan tanggung jawabnya nampak mengalami gangguan psikologis, seperti sering terlambat, suka membolos dengan berbagai alasan yang masuk akal. Semuanya merupakan refleksi moral kerja yang rendah. Moral kerja adalah reaksi mental terhadap tugas yang dikerjakan.

Ketiga, Guru di daerah industri

Di daerah industri guru memperoleh gaji yang relatif cukup. Namun demikian ada sisi lain yang menimbulkan masalah psikologis. Siswa sekolah di daerah industri berasal dari orang tua yang terpelajar. Sering kali muridnya dipandang memiliki pengetahuan yang lebih mantap dari gurunya sendiri, karena mereka dari keluarga terpelajar dan terdidik. Para siswa datang dengan bus sekolah dan sering dengan mobil pribadi orang tua, sementara guru memakai sepeda biasa atau berjalan kaki. Sering terjadi faktor psikologis berpengaruh terhadap kinerja guru.

Semua gambaran di atas menunjukkan profil seorang guru. Sekarang orang mulai melihat jabatan guru sebagai jabatan yang tidak menarik. Seorang sosiolog pernah mengemukakan faktor - faktor yang menyebabkan status guru dianggap lebih rendah bila dibandingkan dengan jabatan lain, seperti dokter atau hakim. Peranan guru dipandang kurang utama dan kurang dinamis walaupun kegiatan mengajar dan mendidik dipandang sangat vital.

5. Kenyataan dan harapan fungsi sekolah menengah sebagai lembaga pendidikan menengah

Dalam UUSPN pasal 15 : 2 maupun praktek pelaksanaan sistem pendidikan yang berlaku sampai sekarang menunjukkan bahwa sistem pendidikan menengah di Indonesia meliputi pendidikan umum, pendidikan kejuruan, pendidikan keagamaan dan pendidikan kedinasan. Walaupun jenis dan variasi pendidikan menengah kejuruan demikian banyak, jumlah

lulusan sekolah lanjutan atas , perimbangan lulusannya menunjukkan bahwa lebih dari 60 % , yaitu 648.003 lulusan dari 974.471 lulusan SLTA adalah lulusan SMU. Dari jumlah lulusan ini, kurang dari 10 % yang diterima di Perguruan Tinggi negeri. Hampir 50 % tidak melanjutkan pendidikan ke Perguruan Tinggi. Inilah kenyataan yang dihadapi. Kenyataan besar di atas mengandung makna bahwa; (1) sebagian besar yang masuk SMU tidak memiliki dasar akademik yang memadai untuk mengikuti pendidikan akademik tingkat universitas; (2) sebagian besar lulusan SMU tidak dapat melanjutkan pendidikannya ke jenjang pendidikan tinggi.

Kenyataan lain yang kita saksikan adalah bahwa kurikulum SMU disusun sebagai kurikulum pendidikan akademik dan berlaku sama untuk semua peserta didik yang memasuki SMU, dimanapun mereka berada dan apapun kemampuan akademik para peserta didik. Jadi kalau kita menilai hasil pendidikan SMU hanya dari keberhasilan mereka menyerap materi kurikulum SMU yang orientasinya akademik tanpa memperhatikan apakah semua memiliki kemampuan dasar akademik yang memadai. Apakah karena kita mempersepsikan SMU sebagai lembaga pendidikan akademik persiapan kependidikan universitas.

Kenyataan di atas mengandung makna bahwa masyarakat melihat SMU sebagai sekolah yang program pendidikannya dapat diikuti oleh semua peserta didik yang telah mengikuti pendidikan SMP, sedangkan dunia pendidikan

tinggi memandang SMU sebagai lembaga pendidikan untuk menyiapkan peserta didik untuk mengikuti pendidikan tinggi. Inilah dilemanya eksistensi pendidikan menengah bangsa Indonesia khususnya SMU.

B. Permasalahan

Pengertian pembinaan sangat luas, namun konsep pembinaan dapat dibagi dalam tiga gugus yakni (1) *penerimaan, pemeliharaan dan pemapanan*; (2) *perbaikan*; (3) *peningkatan mutu (pelanjutan)* (William B. Castetter, 1981:45).

Pengertian pembinaan dalam konteks *pertama* adalah upaya memelihara dalam konteks perbaikan mengacu kepada suatu aktivitas konstruktif yang bertujuan membentuk /menciptakan kualitas sesuatu. Pengertian *kedua* adalah proses restrukturisasi kualitatif suatu hal yang dinilai kurang memadai menjadi sesuatu yang memadai. Pengertian *ketiga* adalah merujuk kepada aktivitas peningkatan kualitas sesuatu agar mencapai bentuk kualitas lebih baik (memuaskan).

Pembinaan dalam konteks pembinaan profesional adalah sebagai aktivitas pemeliharaan, perbaikan dan peningkatan profesional guru. Dapat juga diartikan suatu sistem bantuan profesional yang berfungsi untuk meningkatkan kemampuan profesional guru sehingga mereka mampu merencanakan, melaksanakan dan menilai Proses Belajar mengajar (Tangyong, 1989:65). Lebih jauh Jam'an Satori (1989) mengartikan pembinaan profesional guru ialah suatu

usaha yang sifatnya membantu, mendorong dan memberi kesempatan kepada pegawai untuk meningkatkan kemampuan profesionalnya agar mereka dapat melaksanakan tugas utamanya yang lebih baik yakni memperbaiki PBM dan meningkatkan mutunya.

Pembinaan profesional dalam penelitian ini adalah suatu upaya memelihara kemampuan guru yang memadai, memenuhi kekurangan agar sesuai dengan tuntutan profesi, di samping menambah dan meningkatkan mutu profesional agar lebih memadai. Penelitian ini diarahkan untuk mengubah perilaku menyangkut pengetahuan, ketrampilan, maupun sikap guru supaya sesuai dengan tuntutan profesi.

Untuk memperoleh kualitas guru baik yang menyangkut perilaku, pengetahuan dan ketrampilan yang sesuai dengan tuntutan profesinya maka perlu dilakukan suatu SISTEM PEMBINAAN KEMAMPUAN PROFESIONAL GURU dengan pertanyaan permasalahan seperti berikut ini.

1. Komponen apa saja yang terkait dalam sistem pembinaan kemampuan profesional guru SLTA dibawah naungan LP. Ma'arif Cabang Jepara Jawa Tengah.
2. Pendekatan apa yang tepat dalam pembinaan kemampuan profesional guru SLTA di bawah naungan LP. Ma'arif cabang Jepara Jawa Tengah.
3. Aspek apa saja yang menjadi penekanan dalam pembinaan kemampuan profesional guru SLTA dibawah naungan LP. Ma'arif NU Cabang Jepara Jawa Tengah.
4. Bagaimana bentuk pembinaan profesional guru SLTA di

- bawah naungan LP. Ma'arif NU Cabang Jepara Jawa Tengah.
5. Apa penunjang, kelemahan, kesempatan dan tantangan dalam pembinaan kemampuan profesional guru SLTA dibawah naungan LP. Ma'arif NU Cabang Jepara Jawa Tengah.

C. Tujuan Dan Kegunaan

Tujuan penelitian ini adalah berusaha untuk mendeskripsikan dan menganalisis tentang upaya pembinaan kemampuan profesional guru dilingkungan LPM NU Cabang Jepara yang berkenaan dengan :

- (1) Komponen yang terkait dalam pembinaan kemampuan profesional guru SLTA dibawah naungan LP. Ma'arif cabang Jepara Jawa Tengah;
- (2) Pendekatan yang tepat untuk melakukan pembinaan kemampuan profesional guru SLTA dibawah naungan LP. Ma'arif Cabang jepara Jawa Tengah;
- (3) Aspek-aspek yang menjadi penekanan dalam melakukan pembinaan kemampuan profesional guru SLTA di bawah naungan LP. Ma'arif NU Cabang Jepara Jawa Tengah;
- (4) Bentuk pembinaan profesional guru SLTA dibawah naungan LP. Ma'arif Cabang Jepara Jawa Tengah;
- (5) Kekuatan, kelemahan, kesempatan dan tantangan dalam pembinaan kemampuan profesional guru SLTA dibawah naungan LP. Ma'arif Cabang Jepara Jawa Tengah.

Kegunaan penelitian ini :

- (1) Sebagai pengembangan khasanah ilmu pengetahuan khususnya di bidang ilmu Administrasi Pendidikan;

- (2) Dapat menemukan konsep atau bentuk pembinaan kemampuan profesional guru di lingkungan organisasi Nahdlatul Ulama yang menyangkut pendekatan, aspek pembinaan, proses pembinaan serta hal-hal yang menyangkut dengan SWOT;
- (3) Sebagai bahan masukan kepada organisasi Nahdlatul Ulama khususnya LPM NU Cabang Jepara dalam proses pembinaan kemampuan profesional guru;
- (4) Kusus bagi peneliti, dapat menambah dan meningkatkan pengetahuan secara ilmiah kususnya dalam ilmu pembinaan kemampuan profesional guru.

D. Paradigma Penelitian

Paradigma penelitian dimaksudkan sebuah alur penelitian yang akan dilalui /ditempuh sehingga dapat diketahui secara jelas apa yang diharapkan dan diperoleh.

Penelitian ini dimulai dengan memahami, menghayati dan menganalisa konsep Ahlussunah waljama'ah (ASWAJA), perangkat yuridis NU dan LPM NU dan undang-undang SPN. Untuk memenuhi harapan yang tertera dalam ASWAJA, LPM NU dan UUSPN maka diperlukan suatu proses meningkatkan SDM yang disebut Proses Pendidikan.

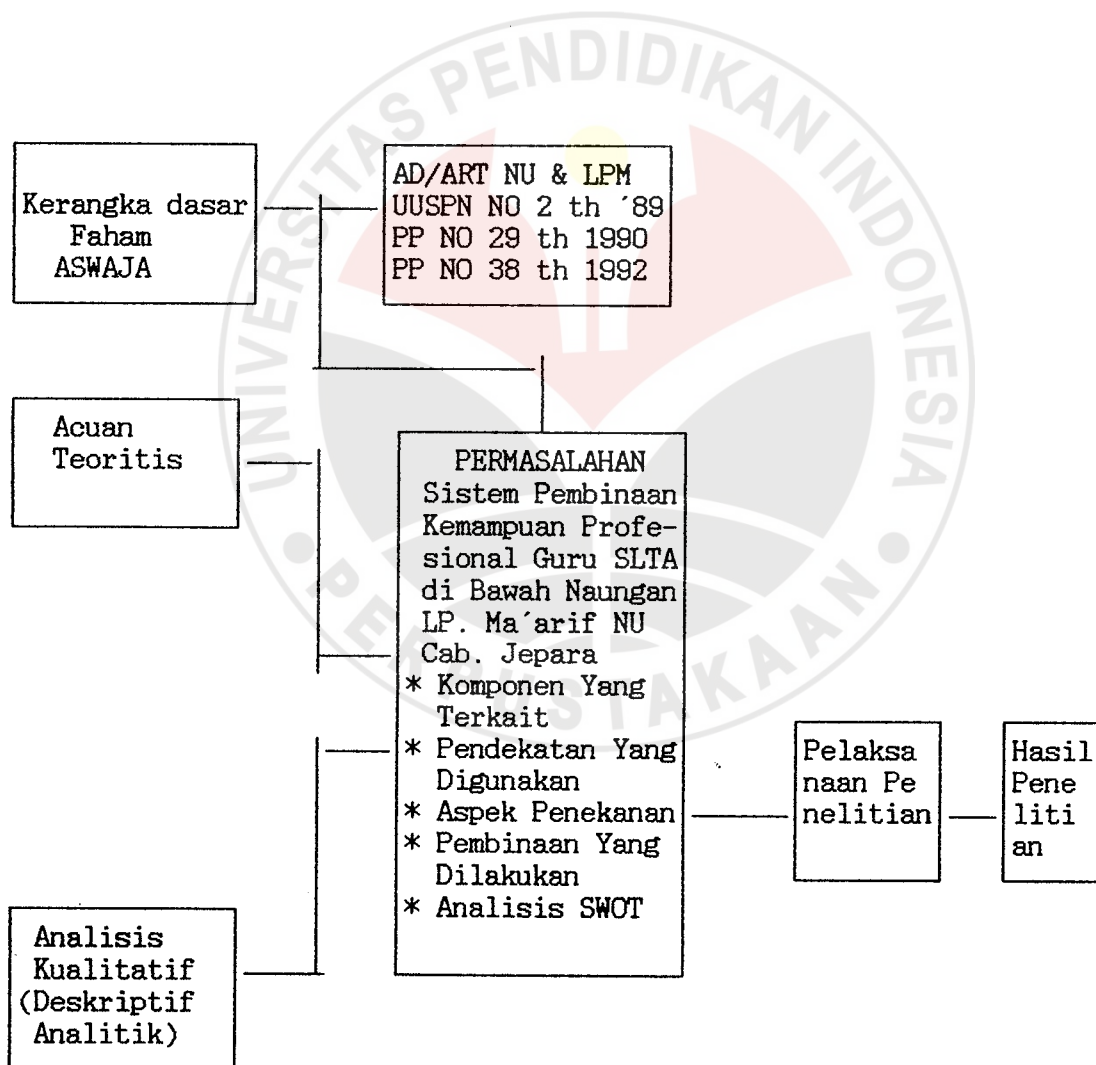
Proses pendidikan dipengaruhi oleh beberapa faktor seperti pendidik (guru), peserta didik (siswa), tujuan, metode, sarana prasarana dan lingkungan. Dari sekian banyak faktor pendidik merupakan faktor yang perlu memperoleh perhatian lebih besar.

Untuk memperoleh kualitas guru yang baik diperlukan

pembinaan yang terencana, sistematis dan relevan dengan situasi dan kondisi. Pembinaan yang akan dilakukan dalam penelitian ini meliputi pendekatan, aspek yang menjadi penekanan dan proses pembinaan yang terdiri dari langkah persiapan, perbaikan dan peningkatan kualitas serta analisis SWOT.

Jika diilustrasikan maka akan terlihat seperti pada bagan di bawah ini.

Bagan 1 Padigma Penelitian



E. Sistematika Penulisan Tesis

Tesis ini terdiri dari lima Bab dengan rincian sebagai berikutini.

Bab I PENDAHULUAN. Bab ini terdiri dari Latar belakang masalah, Perumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, paradigma penelitian dan sistematika penulisan tesis.

Bab II TINJAUAN PUSTAKA. Bab ini terdiri dari empat hal yakni (a) Pembinaan Kemampuan profesional guru sebagai bagian dari administrasi pendidikan, (b) Konsep dan ruang lingkup, prinsip dan pendekatan pembinaan kemampuan profesional guru (c) Pembinaan kemampuan profesional guru di lingkungan LPM-NU, (d) Studi pendahuluan yang relevan.

Bab III METODOLOGI PENELITIAN. Bab ini terdiri dari data yang diperlukan, populasi dan sampel, metode penelitian, tahap pelaksanaan penelitian, tehnik pengumpulan data dan analisis data.

Bab IV ANALISIS DATA PENELITIAN. Bab ini terdiri dari analisis tentang Pendekatan pembinaan kemampuan profesional, aspek yang menjadi penekanan, proses pembinaan, dan analisis SWOT.

Bab V PENUTUP. Bab ini terdiri dari kesimpulan, saran dan rekomendasi.

